



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : WIDA NURFAIDA
- Jabatan** : DIREKTUR PEMBANGUNAN JALAN
- NHK** : 467688

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.595.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/370 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.660.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.935.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	252.000.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 252.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	120.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	998.857.894
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.966.657.894
III. HUTANG	Rp.	68.666.666
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.897.991.228

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.